

Corak Pemikiran Nurcholish Madjid dalam Bingkai Politik Kebangsaan di Indonesia

Taufik Hidayatulloh¹, Izzul Muna²

^{1,2} Prodi Falsafah dan Agama, Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia
Email: taufik.hidayatullah@paramadina.ac.id¹, izzul.muna@paramadina.ac.id²



This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Diterima: 06-05-2024

Direview: 11-05-2024

Publikasi: 30-09-2024

Abstrak

Nurcholish Madjid, atau Cak Nur, hidup di tiga masa pemerintahan Indonesia, yaitu orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Pandangannya mencerminkan kondisi masyarakat di setiap masa tersebut. Dalam politik Indonesia, Cak Nur bukan kader atau pengurus partai, melainkan cendekiawan dan aktivis. Dengan peran netral ini, ia bebas menyampaikan pemikirannya tentang kebijakan pembangunan agar sesuai dengan nilai-nilai moral dan visi kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelami pemikiran-pemikiran Cak Nur khususnya terkait dengan politik kebangsaan di Indonesia dengan menemukan corak dan karakteristik dari pemikiran Cak Nur. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*), data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji literatur yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran politik kebangsaan Cak Nur dilihat dari perspektif pembangunan nasional, persatuan nasional, serta demokrasi dan demokratisasi di Indonesia mencerminkan corak yang religius, nasionalis, humanis, modern, konstitusional, dan kritis. Penelitian ini juga menemukan bahwa latar belakang religius Cak Nur tidak menghalangi perjuangannya dalam bingkai pemikiran nasionalis. Sebaliknya, fondasi keagamaan yang kuat justru memperkaya pandangannya, sehingga mampu memberikan inspirasi bagi kebijakan pembangunan di Indonesia.

Kata Kunci: Nurcholish Madjid; politik kebangsaan; persatuan; demokrasi

Abstract

Nurcholish Madjid, or Cak Nur, lived through three Indonesian governmental eras: the Old Order, the New Order, and the Reform Era. His views reflect the condition of society in each of these periods. In Indonesian politics, Cak Nur was not a party cadre or official but rather a scholar and activist. With this neutral role, he was free to express his thoughts on development policies in alignment with moral values and the vision of national life. The aim of this research is to delve into Cak Nur's thoughts, particularly regarding national politics in Indonesia, by identifying the patterns and characteristics of his ideas. The research method used in this study is library research, with data collected through documentation techniques, including identifying, gathering, and reviewing relevant literature. The collected data was then analyzed using content analysis. The conclusions of this research indicate that Cak Nur's national political thought, viewed from the perspectives of national development, national unity, and democracy and democratization in Indonesia, reflects characteristics that are religious, nationalist, humanist, modern, constitutional, and critical. This study also found that Cak Nur's religious background did not hinder his efforts within a nationalist framework. Instead, his strong religious foundation enriched his views, allowing him to provide insights that could inspire development policies in Indonesia.

Keywords: Nurcholish Madjid; national politics; unity; democracy

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama, terus menghadapi tantangan dalam memelihara keharmonisan sosial dan kestabilan politik. Sebagian besar masyarakat Indonesia berpandangan bahwa kegiatan politik identik dengan perebutan kekuasaan, baik untuk jabatan di tataran eksekutif maupun di tataran legislatif. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya salah karena memang dalam tataran praktis dan pragmatis bahwa politik merupakan perebutan suatu kekuasaan dan kedudukan serta kekayaan baik itu untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompoknya (Nasrudin & Nurdin, 2019). Namun di sisi lain, terdapat hal mulia yang hendak dicapai melalui politik dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk publik. Miriam Budiardjo memaparkan bahwa politik mengandung konsep-konsep pokok, antara lain soal 1) negara, 2) kekuasaan, 3) pengambilan keputusan, 4) kebijakan, dan 5) pembagian atau alokasi. Dalam konsep ini, negara adalah rumah bagi adanya sebuah kekuasaan yang darinya dapat dilakukan pengambilan keputusan untuk menghasilkan kebijakan dalam rangka pembagian atau alokasi (Budiardjo, 2019).

Andrew Heywood menyampaikan tentang makna politik, yaitu kegiatan suatu bangsa dengan tujuan untuk membuat, mempertahankan, serta dalam rangka mengamandemen suatu peraturan-peraturan umum dalam mengatur kehidupan yang terkadang terjadi suatu gejala konflik, akan tetapi juga terjadi adanya kerja sama yang selaras (Heywood, 2007). Dalam definisi ini, kontribusi dari kegiatan politik dapat dilakukan siapapun, tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh setiap anak bangsa sepanjang dalam kerangka tujuan dan dinamika yang terjadi dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini diperkuat sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tahun 1999-2010, K.H. Sahal Mahfudh, beliau kurang lebih menyampaikan bahwa terdapat dua tingkatan politik, yaitu politik tingkat tinggi (*siyasah 'aliyah samiyah*) dan politik tingkat rendah (*siyasah safilah*) (Azra, 2018). Politik tingkat tinggi dapat disebutkan dalam bentuk politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik. Adapun politik tingkat rendah adalah kegiatan politik praktis yang dilakukan oleh partai politik untuk merebut kekuasaan.

Sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan melalui forum Himpunan Mahasiswa Islam/HMI, Nurcholish Madjid yang akrab disapa dengan Cak Nur kerap memberikan pandangan serta sumbangsih pemikiran tentang bagaimana agar pemerintahan Republik Indonesia tetap konsisten pada jalur yang sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Aktivitas ini membuat Cak Nur menjadi lekat dalam dunia politik, meskipun tidak pernah masuk dalam partai politik (Yusdani, 2023). Menurut (Sabri, 2014), meskipun Cak Nur menghabiskan pendidikan dasar dan menengahnya di pesantren, dalam jenjang pendidikan selanjutnya Cak Nur lebih akrab dengan pendidikan modern yang beliau dapatkan di universitas dari jenjang S1 sampai dengan jenjang S3. Hal ini membuat Cak Nur, selain mempunyai pengetahuan akan khazanah Islam, juga tidak asing dan bahkan akrab dengan pemikiran-pemikiran modern yang beliau peroleh selama menempuh pendidikan di Barat. Modal inilah yang membuat Cak Nur mempunyai pandangan yang holistik dan mampu memadukan antara pemikiran yang bersumber dari khazanah Islam dengan pemikiran-pemikiran kontemporer yang tumbuh di era modern.

Pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran Cak Nur yang telah disampaikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara inilah menarik untuk dikaji dan diteliti, khususnya mengenai corak dan karakteristik dari pemikiran Cak Nur. Politik kebangsaan sendiri cenderung mempunyai spektrum yang lebih luas daripada sekadar politik praktis yang orientasinya lebih dekat ke perebutan kekuasaan. Politik kebangsaan mengandung nilai-nilai yang elegan dan cenderung digunakan dalam memberikan sumbangsih pada tatanan kehidupan bangsa yang lebih baik tanpa pamrih tertentu atau imbal hasil dalam bentuk kekuasaan. Cak Nur dalam posisi sebagai intelektual muslim mengambil posisi yang tepat dengan menjaga jarak dari politik praktis, namun tetap peduli pada kemajuan kehidupan berbangsa. Hal ini membuat pemikiran Cak Nur mempunyai potensi didengar oleh banyak pihak tanpa dianggap mempunyai kepentingan tertentu yang bersifat pribadi ataupun partisan (Rasyidin, 2020).

Pada penelitian terdahulu, terdapat beberapa studi tentang pemikiran Nurcholish Madjid terkait politik. Misalnya, penelitian yang ditulis oleh (Mustofa, 2021) berjudul "Saeculum-Mundus Politik Indonesia: Merupakan Satu Kajian Filosofis dalam Perspektif Nurcholish Madjid". Dimana penelitian ini mencoba mengkonfirmasi bahwa paruh kedua abad kedua puluh, Nurcholish Madjid melalui konsep "sekularisasi" dalam pembaharuan pemikiran politik Islam mendapat berbagai reaksi yang cukup dinamis. Cak Nur melihat, perlu dipisahkan agama dari sosial-politik. Oleh

karena itu, muncul slogan “Islam yes, partai Islam no.” Tentu basis gagasan yang dibangun adalah suatu konsep rasionalitas merupakan otoritas utama dalam paradigma ilmu sosial. Sementara di sisi lain, yaitu dogma pada kehidupan manusia itu merupakan bagian dari proses perkembangan suatu sejarah yang tunduk terhadap adanya suatu perubahan zaman. Oleh karenanya, segala eksistensi niscaya akan berubah; karenanya satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri.

Kemudian, artikel yang diterbitkan di jurnal *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* oleh (Fautanu et al., 2020) berjudul “Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid” selaras dengan apa yang terjadi pada masyarakat Muslim tentang politik identitas yang kental terjadi dengan penggiringan opini pada suatu agama. Pada prinsipnya, hal ini merupakan sesuatu yang terjadi pada budaya politik. Corak politik identitas masyarakat Muslim DKI Jakarta terjadi salah satunya dalam bentuk ukhuwah Islamiyah yang lebih didasarkan pada suatu faktor budaya dan keagamaan. Bentuk ini acap kali diwujudkan dalam bentuk keaktifan yang sebenarnya dalam rangka mendapatkan electoral yang diusung dengan menggerakkan masyarakat Muslim yang bisa dikategorikan sebagai politik identitas.

Selanjutnya, penelitian tentang politik Nurcholish Madjid yang ditulis oleh (Lismijar, 2017) dalam artikel yang diterbitkan di jurnal *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* menjelaskan mengenai adanya beberapa ide yang dipaparkan oleh Nurcholish Madjid mengenai adanya hubungan sinergi antara agama dan negara. Di antaranya adalah diskursus tentang Islam dengan *nation-state*, Islam dengan Pancasila, Islam dengan Demokrasi, serta Islam dengan Pluralisme. Salah satu pemikirannya terformulasikan yang terkenal yaitu jargon “Islam Yes, Muslim Party No!”.

Beberapa hasil penelitian di atas, sangat jelas dan berharga kontribusi pemikiran Nurcholish Madjid dalam membangun landasan kerangka pemikiran penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji corak pemikiran Nurcholish Madjid dalam bingkai politik kebangsaan di Indonesia, mengungkap bagaimana ide-ide beliau dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan politik yang demokratis dan harmonis di tengah keberagaman.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengandalkan sumber-sumber tertulis yang relevan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus utama menguraikan dan menganalisis corak pemikiran Nurcholish Madjid tentang politik kebangsaan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder mencakup buku-buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan pemikiran Nurcholish Madjid. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya dalam menggambarkan pemikiran Cak Nur.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji literatur yang relevan. Buku-buku, jurnal, dan artikel yang ditulis oleh Cak Nur maupun oleh penulis lain yang memiliki intensitas dengan pemikirannya dijadikan bahan utama dalam pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam pemikiran Cak Nur dan bagaimana tema-tema tersebut mencerminkan corak pemikirannya tentang politik kebangsaan di Indonesia.

Beberapa tema utama yang dianalisis meliputi pembangunan nasional, persatuan nasional, serta demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Hasil dari analisis ini disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai corak pemikiran Nurcholish Madjid. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menggali dan menguraikan bagaimana pemikiran Cak Nur dapat memberikan kontribusi terhadap politik kebangsaan di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa dari tema-tema tersebut dapat digali lebih dalam tentang corak pemikiran Cak Nur terkait politik kebangsaan di Indonesia. Metode yang jelas dan terstruktur ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang akurat dan dapat diandalkan sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang pemikiran Nurcholish Madjid.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Politik Kebangsaan di Indonesia

Istilah politik saat ini identik dengan kegiatan politik yang dilakukan oleh partai-partai. Padahal apabila ditelisik lebih jauh terdapat berbagai macam kegiatan politik. Effendi mendefinisikan politik sebagai usaha menggapai kehidupan yang baik (Bahktiar Effendi, 2001).

Adapun (Piscatori, 2008) politik ideal dalam pendefinisian dalam bentuk baik merupakan suatu usaha dalam mencapai tatanan sosial yang baik serta berkeadilan. Menurut Andrew Heywood, bahwa politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan suatu bangsa dengan tujuan diantaranya untuk membuat, mempertahankan, bahkan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang kemungkinan adanya gejala konflik dan juga terjadi kerja sama dalam mencapai tujuan (Heywood, 2007). Apabila memperhatikan ketiga definisi politik di atas, maka setiap usaha anak bangsa untuk menggapai kehidupan atau mencapai suatu tatanan sosial yang tepat, baik serta berkeadilan, maka sudah terhitung masuk dalam kegiatan politik. Bisa disimpulkan pula bahwa kegiatan politik tidak hanya dimonopoli oleh partai politik saja, tetapi juga masyarakat di luar partai politik, namun berkegiatan sesuai dengan definisi politik di atas.

Selama lebih dari dua dekade ini, sebagai dampak dari terbukanya ruang politik bagi anak bangsa sebagai efek peralihan pemerintahan Orde Baru ke Orde Reformasi, masyarakat hampir setiap saat disugahi "sajian" politik praktis. Kegiatan politik kemudian menjadi tema yang sering diperbincangkan di ruang publik. Menjadi menarik karena setiap pihak bebas membicarakan hal apapun yang terkait dengan tema politik. Dari mulai soal pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah, serta juga gosip-gosip lain terkait pertarungan politik di tingkat elit. Situasi yang berbeda ketika masyarakat berada di era Orde Baru. Pada era Orde Baru, kegiatan politik praktis dibatasi dan hanya menjadi suguhan sehari-hari pada saat jelang pemilihan umum legislatif yang berlangsung tiap lima tahun sekali. Adapun pemilihan presiden dan kepala daerah, praktis tidak terlalu sampai pada level masyarakat bawah karena dilakukan pemilihan oleh wakil rakyat di DPR/DPD. Hal itu membuat situasi politik di era Orde Baru relatif "stabil" (Zulifan, 2016).

Kestabilan situasi politik itu tidak sepenuhnya baik karena bagaimanapun pemerintahan yang berkuasa harus tetap diberi "vitamin" agar terjaga vitalitasnya dalam menjalankan amanat rakyat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, diperlukan pandangan-pandangan dan/atau pemikiran-pemikiran yang segar agar pemerintah mempunyai opsi yang lebih banyak dan berkualitas dalam menghasilkan kebijakan politik yang berpihak kepada masyarakat banyak. Hal tersebut kiranya tidak hanya dimonopoli oleh para politis saja, tetapi juga setiap anak bangsa yang peduli terhadap keberlangsungan kehidupan bangsanya. Kepedulian itu, menurut Rais Aam Syuriah PBNU 1999-2010 K.H. Sahal Mahfudh, merupakan bentuk praktik politik tingkat tinggi (*siyasah 'aliyah samiyah*), alih-aih politik tingkat rendah (*siyasah safilah*) (Maulana, 2018). Politik tingkat tinggi dapat disebutkan dalam bentuk politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik. Adapun politik tingkat rendah adalah kegiatan politik praktis yang dilakukan oleh partai politik untuk merebut kekuasaan.

Apa yang telah dialami bangsa Indonesia dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 dan 2019, serta beberapa pemilihan kepala daerah (Pilkada), khususnya Pilkada DKI tahun 2017, meninggalkan luka yang cukup mendalam. Kontestasi politik praktis tersebut telah membuat polarisasi sosial sedemikian rupa, sehingga kerukunan hidup berbangsa terbelah. Dalam pidato pengukuhan Doktor Kehormatan dalam bidang Sosiologi Politik pada Universitas Brawijaya Malang, Surya Paloh, Ketua Umum Parta Nasdem menyampaikan bahwa politik kebangsaan adalah garis politik yang mestinya bisa menjadi komitmen semua partai politik. Paloh menambahkan bahwa pemilu hanya ajang kontestasi berulang tiap lima tahun, tetapi keberlangsungan dan eksistensi negara-bangsa ini adalah sepanjang zaman. Oleh karena itu, perlu kesadaran bahwa di atas politik kontestasi sesungguhnya terdapat politik kebangsaan, yakni politik yang mengedepankan serta mengarusutamakan kepentingan bangsa, di atas kepentingan kelompok. Hal ini diperkuat dengan pendapat Saleh Daulay bahwa tujuan politik kebangsaan sesungguhnya adalah dalam rangka memperkuat kohesivitas sosial dan persatuan nasional yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi (Prayogi, 2019).

b. Pemikiran Nurcholish Madjid dalam Politik Kebangsaan

Sebagai sosok yang telah aktif dalam dunia politik sejak zaman mahasiswa dengan aktif di HMI di era awal 1960-an, Cak Nur telah terlibat langsung dalam tukar menukar gagasan dalam diskursus yang menjadi obyek pemikiran, sebagai upaya menata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang bermartabat, sesuai dengan cita-cita bangsa. Aktivitas ini membuat Cak Nur mempunyai ruang untuk menyampaikan gagasan dan ide pemikirannya, sehingga mampu menjadi pengaya dan katalis dalam upaya tersebut (Hajam & Saumantri, 2022). Kapasitas Cak Nur yang lebih dikenal sebagai intelektual atau cendekiawan daripada sebagai seorang politisi partisan, membuat gagasan dan ide Cak Nur mampu menembus berbagai ruang diskusi publik. Selain juga disebabkan visi dan keluasan pemikiran yang mencoba mendobrak kejumudan

berpikir pada era itu. Beberapa tema yang menjadi obyek pemikiran Cak Nur dalam konteks politik kebangsaan sebagai berikut (Rachman et al., 2019).

1) Pembangunan Nasional

Sebagai sosok yang tumbuh dan besar secara intelektual di era Orde Baru, Cak Nur banyak memberikan catatan terkait dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh tim pemerintahan Presiden Soeharto. Pembangunan di era Orde Baru memang identik dengan pembangunan di sektor ekonomi. Pemerintahan Orde Baru ingin sekali menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah terjadinya krisis politik dan ekonomi di tahun 1965 dalam bentuk menyiapkan berbagai landasan agar Indonesia mampu menjadi negeri industri modern yang berdaya saing tinggi, baik di tingkat regional dan internasional (Majid, 1998).

2) Perataan Beban dan Kesempatan sebagai Perwujudan Keadilan Sosial

Cak Nur pada kesempatan ini memberikan catatan bahwa segala bentuk pertumbuhan ekonomi harus tetap memperhatikan adanya suatu perataan beban maupun kesempatan di dalam segala bidang, pada individu-individu maupun kelompok-kelompok anggota bangsa, dimana hal itu merupakan wujud nyata dari ide tentang keadilan sosial yang merupakan salah satu tujuan bernegara (Madjid, 1997). Hal ini dikarenakan Orde Baru mempunyai kecenderungan untuk membagi "kue" pembangunan hanya pada beberapa pihak tertentu yang terkhusus mempunyai kedekatan dengan penguasa. Padahal di lain pihak, dengan adanya perataan beban dan kesempatan, membuat percepatan pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih cepat karena perputaran lebih merata di berbagai pihak, yang berakibat kesempatan tumbuh akan menjadi lebih luas. Perataan tersebut dalam mewujudkan keadilan bagi Cak Nur itu sangat penting, karena dengan keadilan dan peradaban yang kukuh akan terwujud, sebab keadilan merupakan dasar moral yang kuat bagi pembangunan peradaban manusia sepanjang sejarah (Madjid, 1992).

Secara spesifik, soal perataan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi juga menyinggung soal dikotomi yang masih terbawa pada zaman penjajahan Belanda, yaitu pribumi dan nonpribumi. Dalam masa penjajahan Belanda, pribumi memang berada pada kasta yang paling bawah sehingga kesempatan untuk mengakses kegiatan ekonomi terbatas, kalau tidak dikatakan minim. Padahal disatu sisi, pribumi adalah lapisan paling besar dalam struktur penduduk Indonesia. Pada akhirnya terbawa bahwa pribumi identik dengan kaum yang tidak beruntung. Dalam pengamatan sosiologisnya, Cak Nur melihat ada golongan tertentu di Indonesia yang mempunyai kelebihan kewirausahaan yang kuat. Bahkan diakui di dunia internasional. Kekuatan mereka didorong antara lain pada peranan etika konfusianisme untuk memacu kemajuan golongan mereka (Rachman et al., 2019). Cak Nur melihat hal ini patut dijadikan cermin untuk menumbuhkan nilai kewirausahaan di kalangan pribumi. Bahkan, mengutip pandangan (Geertz, 2013), kalangan ksatria di Bali dan kalangan santri di Jawa, sesungguhnya memiliki jiwa kewirausahaan yang potensial berkembang. Lebih lanjut, melihat potensi tersebut, kiranya butuh kemauan politik untuk membuka akses seluas-luasnya, bagi kalangan santri khususnya karena secara struktur politik santri belum mendapatkan ruang yang layak dibandingkan kalangan priyayi. Sebuah fenomena yang masih terbawa zaman penjajahan Belanda.

3) Sosialisme Religius

Kata sosialisme religius, baik dalam bentuk istilah ataupun ide, sesungguhnya telah dicetuskan sejak perkembangan Sarikat Islam di Indonesia, yakni sekitar tahun 1910-1920. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan tujuan negara Indonesia juga banyak mengadopsi pemikiran berwatak sosialisme religius. Mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial misalnya. Cak Nur mengungkapkan kenapa sosialisme religius perlu diangkat kembali untuk mengawal proses Pembangunan di Indonesia. Karena bagi Cak Nur, sosialisme religius mempunyai dimensi mendalam yakni dilakukannya pengukuhan dasar moral cita-cita bangsa karena tidak hanya adanya dorongan kehendak berkehidupan akan lebih memiliki kebahagiaan di dunia saja, namun juga dalam kehidupan yang kekal di akhirat. Sebab itu, sosialisme tidak hanya sebatas komitmen kemanusiaan saja, akan tetapi juga Ketuhanan. Sebab dasar moralnya kuat dan sosialisme yang diharapkan tidak mudah terjerumus ke dalam lembah metode kerja "tujuan menghalalkan cara" sebagaimana pernah terjadi yang dilakukan oleh suatu gerakan sosialis atau komunis radikal (Badarussyamsi et al., 2023).

4) Industrialisasi, Modernisasi dan Gejala Dehumanisasi

Meskipun Indonesia pada saat awal Orde Baru masih dominan menjadi negara agraris, tetapi proses Indonesia menjadi negara industri dan modern telah masif dilakukan oleh pemerintah. Cak Nur menangkap bahwa perubahan menjadi negara industri akan melahirkan nilai-nilai baru yang menunjang proses industrialisasi dan modernisasi tersebut. Beberapa nilai baru masyarakat industri, antara lain (1) upah diberikan dalam kurun waktu tertentu (awal, tengah atau akhir bulan, bisa juga mingguan), hari bebas kerja, sistem cuti, sistem kerja birokratis dan disiplin (Hasan, 2015). Terkait dengan proses industrialisasi dan modernisasi, Cak Nur memberikan penekanan bahwa jangan sampai ada penghilangan sisi kemanusiaan masyarakat. Karena bagaimanapun adanya industrialisasi akan menggeser pola-pola interaksi yang sudah mapan di masyarakat dan juga di keluarga, seperti menurunnya peran ayah sebagai agen sosialis anak digantikan dengan sekolah dan pergaulan sebagai bentuk hubungan sosial yang lain (Hidayatulloh, 2024).

Di satu sisi, Cak Nur sependapat dan sejalan dengan industrialisasi dan modernisasi yang banyak berkiblat pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan jika dikaitkan dengan religiusitas, Cak Nur meyakini bahwa religiusitas tidak akan terancam oleh proses industrialisasi dan modernisasi, tetapi sebaliknya memperoleh topangan dan penguatan yaitu masyarakat akan bebas dari magisme dan agama menjadi semakin murni. Keagamaan tidak lagi dipandang dari nilai instrumental, tetapi sudah menjadi konsumsi kultural individu yang melihat ibadah sebagai tujuan pada dirinya sendiri yang menjadi sumber kebahagiaan (Muhammedi, 2017). Sebagai contoh, dalam memberantas hama tanaman, masyarakat tidak akan melakukan instrumen doa, tetapi dalam bentuk kongkrit yang telah disediakan oleh ilmu dan teknologi.

c. Persatuan Nasional

Indonesia sebagai sebuah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan kebudayaan, tentunya akan mempunyai persoalan yang terkait dengan bagaimana mewujudkan keragaman tersebut mampu diramu menjadi sebuah kekuatan yang saling mengisi. Secara ideologis, ide persatuan nasional telah diwadahi dalam ideologi negara yaitu Pancasila di sila ketiga. Selain itu, Indonesia juga telah mempunyai semboyan yang meneguhkan bahwa perbedaan tidak menimbulkan perpecahan antar sesama anak bangsa, yaitu pada semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua (Hidayatulloh & Saumantri, 2023). Beberapa catatan Cak Nur terkait dengan tema persatuan nasional dapat dijelaskan di bawah ini.

1) Kosmopolitanisme, bukan Nativisme

Catatan Cak Nur terkait dengan persatuan nasional adalah bagaimana proses perangkuman budaya-budaya daerah ke dalam budaya Indonesia haruslah dilandasi dengan semangat kosmopolitanisme, bukan nativisme. Sebab, dalam kelanjutan wajarnya, antivisme akan hanya berakhir pada daerahisme, jika bukan sukuisme (Munawar, 2020).

Bagi Cak Nur, suatu nativisme yaitu sikap atau paham suatu negara atau masyarakat terhadap kebudayaan sendiri berupa gerakan yang menolak pengaruh, gagasan, atau kaum pendatang akan menjadi penghalang besar pertumbuhan keindonesiaan. Karena masing-masing suku akan cenderung menutup diri dan bersikap eksklusif, sehingga menutup kemungkinan untuk bersatu dalam ragam keindonesiaan. Dengan berlandaskan pada kosmopolitanisme, masyarakat akan terlatih untuk menerima beragam perbedaan dan sanggup untuk hidup dan tumbuh bersama dengan keragaman tersebut, serta mengakui bahwa keragaman merupakan bagian dari kekayaan bangsa itu sendiri (Madjid, 2000).

2) Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila merupakan ideologi negara yang bersifat final dan sudah tidak diragukan lagi (Aini & Dewi, 2022). Pancasila juga secara efektif mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa agar terhindarkan dari perpecahan antar anak bangsa, khususnya sebagaimana pernah terlihat pada tragedi 1965. Tetapi, Cak Nur tetap memberikan catatan terkait dengan implementasi Pancasila agar selanjutnya tidak dijadikan sebagai sumber legitimasi bagi usaha-usaha dalam mempertahankan *status quo* dan menjadi alat untuk pemukul orang atau kelompok lain yang kebetulan saat itu "tidak berkenan di hati" (Saumantri, 2022). Apabila hal ini terjadi, tentu amat rawan untuk menjadi referensi atau sejarah buruk yang dapat disimak bersama dan bukan tidak mungkin karena pergeseran peta kekuasaan. Pancasila akan kembali digunakan sebagai alat pemukul balik sebagaimana itu dilakukan pada rezim sebelumnya. Sebuah situasi yang amat rawan bagi persatuan nasional.

Cak Nur menawarkan Pancasila agar difungsikan kembali secara penuh sebagai sumber untuk memacu masa depan dengan tetap memunculkan sikap proaktif untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Karena boleh jadi masih banyak nilai-nilai luhur bangsa yang belum ter gali yang nantinya akan diperlukan dalam perkembangan kemajuan bangsa. Cak Nur juga menekankan bahwa Pancasila adalah ideologi modern yang bersifat tertutup dan dalam perumusannya jangan dilakukan secara rinci karena sebagai ideologi perlu longgar agar dapat dipakai selamanya untuk kepentingan keutuhan bangsa (Naim, 2015).

3) Kerukunan Antarumat Beragama

Selain mempunyai beragam suku, Indonesia sejatinya memiliki keragaman agama yang dianut oleh masyarakat. Secara resmi terdapat enam agama yang diakui oleh negara yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Selain keenam agama yang diakui negara tersebut, sejatinya masih banyak sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Sebagai contoh Sunda Wiwitan, Kapitayan, Kejawen, Kaharingan, Tolotang, dan lain sebagainya yang merupakan sistem kepercayaan peninggalan nenek moyang Indonesia yang cenderung bercorak animism atau dinamisme. Selain itu, juga terdapat agama-agama dari luar Indonesia yang dibawa oleh para pendatang kontemporer, seperti Sikh, Jainisme, Baha'i, Taoisme, Teosofi, dan Yahudi (Franz Magnis-Suseno, 2005).

Dengan keragaman agama dan kepercayaan tersebut, Cak Nur memberikan catatan bagaimana dapat tercipta kerukunan antarumat beragama di Indonesia dan apa kira-kira yang menjadi titik-temu agama-agama dan kepercayaan tersebut? Cak Nur memulai dengan perlunya sikap afirmatif terhadap sikap yang selama ini sudah tumbuh di masyarakat, yaitu adanya saling pengertian dan saling menghargai antarumat beragama yang pada urutannya dapat mengandung logika titik-temu, meskipun hanya terbatas kepada hal-hal prinsipil (Hajam, 2018). Hal lain yang lebih rinci seperti ekspresi-ekspresi sebatas simbolik dan formalistik, tentu sulit dipertemukan. Karena bagaimanapun, masing-masing agama mempunyai aturan yang hanya berlaku secara intern yang tidak membenarkan sikap ikut-campur, bahkan merendahkan dari penganut agama lain. Selain itu, diperlukan kesungguhan dalam memeluk agama masing-masing, karena bagaimanapun tiap agama mempunyai jalan kebenarannya sendiri, yang diharapkan akan berdampak pada hubungan dan pergaulan yang baik antarumat beragama (Saumantri, 2023).

d. Demokrasi dan Demokratisasi

Meskipun demokrasi tidak terdapat dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, namun prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya mengarah pada pembentukan demokrasi di Indonesia. Demokrasi mempunyai unsur kata '*demos*' mempunyai arti rakyat dan '*kratos*' mempunyai arti pemerintahan. Hal yang kemudian didefinisikan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Di Indonesia sendiri, demokrasi telah mengalami beberapa fase tertentu yaitu dimulai dari Demokrasi Konstitusional (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Demokrasi Pancasila (1965-1998), dan Demokrasi Era Reformasi (1998-sekarang) (Budiardjo, 2019). Terkait demokrasi, Cak Nur berpandangan bahwa demokrasi adalah suatu "cara" untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Demokrasi sendiri diterapkan dengan asumsi dasar demokrasi adalah persamaan mutlak antara manusia sesamanya (Zuhri, 2020). Egaliter dan tanpa kastanisasi. Dengan begitu, setiap anggota masyarakat bebas menyampaikan aspirasi dan harapannya tanpa adanya beban dengan menyanggah status tertentu.

Demokrasi kemudian perlu diterapkan dalam kehidupan di masyarakat, dalam hal ini tidak hanya berhenti di tataran ide. Proses demokratisasi merupakan contoh konkrit yaitu upaya pemberian hak dan kebebasan yang semakin besar kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan yang sebenarnya, Karena kerakyatan sendiri, merupakan hal yang telah tercantum dalam Pancasila, maka memang dapat dibenarkan bahwa proses tersebut tidak lain ialah proses pelaksanaan Pancasila itu sendiri (Harahap, 2015). Dalam contoh konkrit, demokrasi dapat beriringan dengan prinsip keadilan sosial, dimana dengan demokrasi tercapai pemerataan atas hal-hal yang akan berpengaruh pada usaha pencapaian martabat kemanusiaan yang setinggi-tingginya, antara lain di bidang ekonomi, kesempatan kerja dan yang paling penting, pendidikan (Jamhari, 2020). Beberapa catatan Cak Nur terkait dengan penerapan demokrasi di Indonesia dapat diurai sebagai berikut.

1) Musyawarah Mufakat

Dalam konteks Indonesia, demokrasi dapat mewujudkan dalam budaya musyawarah di dalam kehidupan masyarakat, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pikiran.

Selain itu, dalam musyawarah juga mengandung faham bahwa kesucian asal manusia membuatnya selalu berpotensi untuk benar dan baik, sehingga setiap orang berhak untuk didengar dan setiap hak orang untuk didengar akan menghasilkan kewajiban orang lain untuk mendengar (Kamil, 2002).

Secara etimologis musyawarah mengandung arti saling memberi isyarat, yakni, saling memberi isyarat tentang apa yang benar dan baik; jadi bersifat "*reciprocal*" dan "*mutual*". Sebagaimana disebutkan di atas bahwa musyawarah berprinsip mau mendengar dan untuk didengar, akan membuat suatu ikatan sosial akan adanya hak kewajiban saling memberi isyarat tentang kebaikan dan kebenaran. Dampaknya setiap orang dapat membawa kebaikan dan mencegah kemungkaran. Musyawarah juga mensyaratkan kelapangan dada, keterbukaan, dan kerendahan hati agar setiap pihak lebih mudah menerima satu sama lain dan dapat tercapai kesepakatan (*muwafaqah*) atau mufakat. Mufakat dapat pula dicapai dengan suara terbanyak (Dahlan, 2014). Dalam Islam, musyawarah antar sesama warga masyarakat merupakan bagian dari gambaran dalam al-Qur'an tentang hakikat kaum beriman dan digolongkan sebagai yang bakal mendapatkan anugerah kebaikan Ilahi yang lebih baik dan lebih lestari (QS 42: 36-43) (Rachman et al., 2019).

2) Pemilu

Sebagaimana telah singgung di pendahuluan, terdapat perbedaan antara politik tingkat tinggi dan politik tingkat rendah. Politik tingkat rendah identik dengan politik sebagai sarana perebutan kekuasaan, baik di level eksekutif maupun legislatif. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan perebutan kekuasaan secara sah dan *legitimate*, memerlukan partai politik sebagai kontestan yang akan tampil dan dipilih oleh masyarakat. Setelah hanya berlangsung sekali di era Orde Lama, Pemilu rutin diselenggarakan tiap lima tahun sekali di era Orde Baru maupun Orde Reformasi (Nurcholish Madjid, 1999). Terkait dengan Pemilu dan kepartaian, Cak Nur memberikan catatan bagaimana penyelenggaraan Pemilu dan sistem kepartaian yang ideal. Karena bagaimanapun melalui Pemilu akan lahir pemimpin bangsa yang akan menjalankan amanat rakyat dengan sah dan konstitusional. Termasuk bagaimana melakukan pengawasan terhadap pemerintahan terpilih.

Bagi Cak Nur, dalam penyelenggaraan pemilu patut dikedepankan asas kebebasan dan kerahasiaan karena memang asas tersebut adalah hal yang prinsipil dalam demokrasi. Penekanan kedua asas tersebut adalah untuk menjaga partisipasi bebas setiap orang, baik dalam pemerintah maupun komunitas masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah adanya ketulusan yang sejati dalam pemberian suara sehingga pada urutannya akan mempunyai pengaruh positif dalam menciptakan keabsahan pemerintah dengan kekuasaannya. Pemerintah yang memiliki keabsahan akan memberi landasan kukuh dalam mewujudkan rasa keadilan yang selanjutnya menjadi dasar ketentraman dan kemantapan politik (Madjid, 1999).

3) Kepartaian dan Oposisi

Partai adalah kendaraan yang konsitusional untuk turut serta dalam pemilu di Indonesia. Dalam era Orde Baru, terdapat kebijakan penyederhanaan partai, dengan pertimbangan stabilitas politik, dari yang sebelumnya berjumlah sembilan partai politik dan satu golongan karya pada Pemilu 1971, menjadi hanya tiga partai, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kedua partai terakhir merupakan hasil fusi partai-partai Islam dan partai nasionalis yang telah ikut pada pemilu 1971. Partai-partai inilah yang menjadi saluran aspirasi politik masyarakat Indonesia (Rachman, 2010).

Dalam sistem kepartaian, Cak Nur juga menekankan pentingnya oposisi. Oposisi bagi Cak Nur diperlukan karena ia dapat mempertajam pikiran karena akan ada ruang musyawarah, tukar pikiran, dan diskusi di sana. Hal ini diungkapkan Cak Nur karena melihat partai oposisi belum lazim di Indonesia. Hal ini karena kecenderungan politik Orde Baru adalah "memegang" kendali seluruh partai untuk "stabilitas" politik pemerintahan Orde Baru. Ketiadaan oposisi membuat tidak adanya mekanisme *check and balance* dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Oposisi dalam konteks kepartaian menurut Cak Nur bukan berarti sekadar sebagai penantang, subyektif, dan cenderung memiliki itikad kurang baik pada pemerintahan, misalnya sekadar mencari-cari kesalahan semata. Oposisi yang dimaksud di sini adalah oposisi yang memiliki semangat yang loyal dan tetap mengakui keabsahan suatu pemerintahan untuk bertindak dan tetap mengklaim sebagai pemerintah yang baik (Nadroh, 1999). Tugas oposisi sejatinya cuma satu yaitu mengecek jalannya pemerintahan. Cak Nur juga menambahkan bahwa oposisi atau oposan juga bisa dilakukan oleh masyarakat di luar partai. Oleh cendekiawan dan pers, misalnya yang mampu

menjadi *opinion maker*. Mereka inilah yang akan menjadi kekuatan cadangan dari oposisi langsung yang dilakukan oleh partai politik.

4) Pembinaan “*Floating Mass*”

Pembinaan “*floating mass*” merupakan salah satu upaya penyederhanaan kehidupan kepartaian. Bagi Cak Nur, kenapa hal ini diperlukan adalah untuk membebaskan rakyat dari ikatan-ikatan pandangan dan kelompok politik yang bersifat permanen dan tidak fleksibel dengan cara sekurang-kurangnya tidak membenarkan, suatu partai atau badan politik lainnya membentuk unit-unit organiknya pada tingkat daerah administrasi pemerintahan, yang tidak memerlukan dewan perwakilan. Dalam hal ini ialah tingkat di bawah kabupaten. Dengan begitu, maka struktur vertikal kepartaian akan menjadi lebih sederhana. Penyederhanaan struktur horizontalnya dicapai dengan memperkecil jumlah organisasi *onderbouw* dan dengan mempersedikit jumlah partai itu sendiri. Partai yang identik dengan struktur sampai di bawah tingkatan kabupaten, adalah jenis partai massa yang menghendaki daya jangkau sejauh mungkin kepada massa, yaitu dengan sebanyak mungkin membentuk organisasi-organisasi mantel dan afiliasi, serta secara vertikal dengan mendirikan unit-unit organik sampai pada tingkat administrasi pemerintahan paling bawah. Partai massa juga mempunyai kepentingan membuat solidaritas dengan tujuan sebagai alat untuk melawan musuh (Firdaus, 2014).

Berbeda dengan hal tersebut, Cak Nur lebih menekankan pada pembentukan partai kader yang lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan kader agar berkualitas, dan tidak menitikberatkan usahanya kepada pengumpulan massa. Sejenis partai yang lebih memusatkan perhatian pada usaha pemecahan masalah nasional, terutama pembangunan. Dengan kehidupan kepartaian yang lebih sederhana, sumber daya partai akan dialihkan ke fungsi-fungsi pemecahan masalah nasional. Alih-alih terserap untuk saluran rutin di dalam partai sendiri. Adapun *floating mass* diharapkan masyarakat tidak terbelenggu dari aliran politik yang mengekang dan bebas menentukan penilaian dan sikap. Massa akan lebih fleksibel dan terbuka dan lebih memungkinkan untuk diintrodusir pikiran-pikiran baru yang lebih segar dan maju (Yusdani, 2023).

4. Simpulan

Politik kebangsaan merupakan politik tingkat tinggi yang tidak ditekankan pada perebutan kekuasaan, tetapi lebih pada sikap berkomitmen dan terlibat aktif untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mempersoalkan identitas tertentu dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta bertujuan pada memperkuat kohesivitas sosial dalam memperkuat suatu persatuan nasional dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Bagi Cak Nur, pembangunan nasional perlu memperhatikan perataan beban dan kesempatan bagi setiap warga negara untuk mengembangkan kemampuannya dan mengakses sumber ekonomi sebagai perwujudan keadilan sosial. Selain itu, pembangunan agar dapat diterapkan prinsip sosialisme religius yang tidak hanya memperhatikan kehidupan duniawi, tetapi juga ukhrowi. Pembangunan juga perlu menyesuaikan dengan arus industrialisasi dan modernisasi dengan tidak melupakan aspek kemanusiaan. Dalam mewujudkan persatuan nasional, Cak Nur menekankan pentingnya pemahaman kosmopolitanisme bukan nativisme. Pancasila sebagai ideologi terbuka yang membuka ruang nilai-nilai luhur bangsa untuk dimasukkan dalam memperkuat kohesivitas kehidupan berbangsa, serta perlu dijaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Corak pemikiran Cak Nur sendiri adalah agamis yang tetap mempertahankan nilai agama sebagai spirit, nasionalisme sebagai bentuk kecintaan terhadap negara dan bangsanya, humanis yang selalu mengedepankan aspek kemanusiaan, modern yang berupaya menyelaraskan dengan kehidupan dan kemajuan zaman, konstitusional sesuai dengan ideologi negara untuk merumuskan nilai-nilai yang harus diperjuangkan dan kritis terhadap tatanan yang kurang tepat, bukan untuk mencari kesalahan tetapi lebih pada sikap korektif agar pembangunan bangsa tetap sesuai dengan jalur yang sesuai dengan arah tujuan bangsa.

5. Daftar Pustaka

- Aini, N. Q., & Dewi, D. A. (2022). Sistem Etika Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Pendi Tambusai*, 6(2).
- Azra, A. (2018). Kesalehan dan Politik: Islam Indonesia. *Studia Islamika*, 25(3), 39–50. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i3.9993>.
- Badarussyamsi, B., Begin, D. A., & Kaylani, K. (2023). Pemikiran Sosialisme Islam H.O.S

- Tjokroaminoto untuk Penguatan Visi Demokrasi Indonesia. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(1), 49–68. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.35>.
- Bahktiar Effendi. (2001). *Teologi Baru Politik Islam*. Galang Printika.
- Budiardjo, M. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan, M. (2014). Hubungan Agama dan Negara di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 1–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.635>.
- Fautanu, I., M. B., & Gunawan, H. (2020). Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 87–112. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.8146>.
- Firdaus, M. A. (2014). Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis Dan Perkembangannya. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 13(3), 165–174.
- Franz Magnis-Suseno. (2005). *Pluralisme Agama, Dialog, dan Konflik di Indonesia*. Interfidei.
- Geertz, C. (2013). *Agama Jawa: abangan, santri, priyayi dalam kebudayaan Jawa*. Komunitas Bambu.
- Hajam. (2018). Reformulasi Teologi dari Eksklusif ke Inklusif. *ALQALAM*, 35(1), 19. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i3.858>.
- Hajam, & Saumantri, T. (2022). Meretas Ketegangan Relasi Agama dan Negara di Indonesia dalam Perspektif Nurcholish Madjid. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/rsd.v3i2.534>.
- Harahap, M. I. (2015). Demokrasi Dalam Pandangan Nurcholish Madjid. *Jurnal Al-Harakah*, 3(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/alharakah.v0i3.5495>.
- Hasan, H. (2015). Hubungan Islam dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia. *Al-Ahkam*, 1(25), 19. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.192>
- Heywood, A. (2007). *Politics*. Macmillan Press LTD.
- Hidayatulloh, T. (2024). *Filsafat Islam Kontemporer*. CV. Strata Persada Academia.
- Hidayatulloh, T., & Saumantri, T. (2023). The Harmony of Islam and Pancasila in Religious Discourse in Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 3(1), 1–25.
- Jamhari. (2020). Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Demokrasi dan Negara Islam. *Jurnal Ilmu Agama*, 21(1), 100–119.
- Lismijar, L. (2017). Relasi Agama dan Negara: Analisis Politik Nurcholish Madjid. *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 5(2). <https://doi.org/https://journal.lsamaaceh.com/index.php/kalam/article/view/33>.
- Madjid, N. (1992, December). Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer. *Forum Keadilan, Oposisi Suatu Kenyataan*.
- Madjid, N. (1997). *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan Indonesia*. Paramadina.
- Madjid, N. (2000). *Membangun Oposisi Menjaga Momentum Demokratisasi*. Voice Center Indonesia.
- Majid, N. (1998). *Islam, kemodernan, dan keindonesiaan* (Cet. 1). Mizan.
- Maulana, M. P. (2018). Relasi Islam dan Budaya dalam Wacana Islam Nusantara. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 4(1). <https://doi.org/10.24235/jy.v4i1.3191>
- Muhammedi. (2017). Pemikiran Sosial dan Keislaman Nurcholish Madjid (Cak Nur). *Jurnal Tarbiyah*, 24(2).
- Munawar, M. (2020). Relevansi dan Implementasi Pemikiran Nurcholish Madjid terhadap Politik Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22(2), 325–349. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.325-349>.

- Mustofa, I. (2021). Saeculum-Mundus Politik Indonesia: Satu Kajian Filosofis dalam Perspektif Nurcholish Madjid. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(2), 221–242. <https://doi.org/10.21009/005.02.05>.
- Nadroh, S. (1999). *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*. Rajawali Press.
- Naim, N. (2015). Islam dan Pancasila Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid. *Episteme*, 10(2), 437.
- Nasrudin, J., & Nurdin, A. A. (2019). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 34–47. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260>.
- Nurcholish Madjid. (1999). *Cita-cita politik Islam Era Reformasi*. Paramadina.
- Piscatori, J. P. (2008). Islam in the Political Process. *Islam in the Political Process.*, 42(6). <https://doi.org/10.2307/2619481>.
- Prayogi, I. (2019). Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 31–43. <https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2.1083>.
- Rachman, B. M. (2010). *Reoreintasi Pembaruan Islam Sekularisme, Liberalisme, Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*. Paramadina.
- Rachman, B. M., Taher, E. P., & Nafis, M. W. (2019). *Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan*. NCMS.
- Rasyidin, Y. (2020). Menjelajahi Pemikiran Politik Cak Nur tentang Agama dan Negara. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(1), 35–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v16i1.6840>.
- Sabri, M. (2014). HMI, Cak Nur Dan Gelombang Intelektualisme Islam Indonesia Jilid 2. *Jurnal Diskursus Islam*, 2(2), 317–334. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v2i2.6527>.
- Saumantri, T. (2022). The Harmonization of Religion and The State : A Study of The Indonesia Context. *Syekh Nurjati: Jurnal Studi Sosial Keagamaan*, 1(1), 1–15.
- Saumantri, T. (2023). Membangun Kerukunan Beragama di Era Pluralisme: Kontribusi Konsep John Hick. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 19(1), 111–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/rejusta.v19i1.4414>.
- Sukron Kamil. (2002). *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*. Gaya Media Pertama.
- Yusdani, Y. (2023). Gagasan Politik Gus Dur dan Cak Nur Tentang Indonesia Pasca Reformasi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(2), 165–174. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.482>.
- Zuhri, S. (2020). Napak Tilas Konsep Pemikiran Pendidikan Nurcholis Madjid. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32678/geneologipai.v7i2.3679>.
- Zulifan, M. (2016). Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 171–195. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6583>.